

IMPLEMENTASI RANHAM (RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA) MELALUI PENDIDIKAN INKLUSI DI JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR

Anis Sukmawati¹, Syaifudin², M.A. Muhammad Ulul Azmi³, Hanna Silia Karti⁴

¹²³UIN Sunan Ampel Surabaya, ⁴Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

¹anis.sukmawati@uinsa.ac.id, ²06010321018@student.uinsby.ac.id,

³gusmiek29@gmail.com, dan ⁴hannasiliakarti@gmail.com.

Abstrak

Dokumen Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) diharapkan mampu membuka kesempatan bagi seluruh siswa untuk belajar dan berkembang tanpa diskriminasi. Tuntutan yang memuat hak penyandang disabilitas semakin meningkat pasca ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, yang mengubah paradigma pendekatan kesejahteraan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menelaah bagaimana implementasi RANHAM generasi V melalui pendidikan inklusif dapat menjadi langkah penting dalam perjuangan hak asasi manusia dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan toleran. Sehingga mencapai hasil yang ditetapkan, termasuk dampak yang dapat diukur dengan kriteria keberhasilan dan sasaran strategis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui observasi partisipatif, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus mendapatkan akses terhadap pendidikan formal. Tingkat pendidikan tertinggi yang diselesaikan oleh siswa inklusif juga semakin meningkat, hal ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusif tidak hanya memberikan akses, namun memungkinkan siswa menyelesaikan pendidikannya pada jenjang yang lebih tinggi.

Kata kunci: Disabilitas, Implementasi, Inklusif, Pendidikan, RANHAM

Abstract

The National Human Rights Action Plan (RANHAM) document is expected to open opportunities for all students to learn and develop without discrimination. Demands for the rights of persons with disabilities have increased following the ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, which changed the paradigm of approaches to social welfare. This article aims to examine how the implementation of RANHAM generation V, which has been formulated more substantively and comprehensively, can introduce the concept of inclusion in secondary education in East Java Province. To achieve the specified results, including impacts that can be measured by success This article aims to examine how the implementation of RANHAM generation V through inclusive education can be an important step in the struggle for human rights and create a more inclusive and tolerant society. The method used in this research is descriptive qualitative through participant observation, interviews, and document analysis. The results of this research show that children with special needs have access to formal education. The highest level of education completed by inclusive students is also increasing, this shows that inclusive education not only provides access but allows students to complete their education at a higher level.

Key Words: Disabilities, Implementation, Inclusion, Education, RANHAM

PENDAHULUAN

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Indonesia yang dikukuhkan melalui Peraturan Presiden merupakan instrumen yang menggariskan target, strategi, dan prioritas kegiatan dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemeliharaan, penegakan, dan pemajuan HAM periode 2015-2019. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman dan kerangka umum bagi aparatur negara yang bersifat dinamis, dapat disesuaikan dengan potensi dan tantangan di setiap institusi pemerintahan. Implementasi RANHAM dan RAN Penyandang Cacat sebelumnya telah meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah dan masyarakat mengenai isu HAM secara umum dan permasalahan penyandang disabilitas berbasis HAM.

Namun pencapaian HAM hingga saat ini masih belum mencapai target yang diharapkan. Tuntutan yang memuat hak penyandang disabilitas semakin meningkat pasca ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, yang mengubah paradigma dari pendekatan kesejahteraan masyarakat. Di Jawa Timur masih banyak ditemui kesenjangan di bidang pendidikan, khususnya kepada anak disabilitas yang belum memperoleh pendidikan yang layak.¹ Di Jawa Timur, jumlah penyandang disabilitas usia kerja adalah 9,4 di Provinsi Jawa Timur, tertinggi di Pulau Jawa.²

Dalam pelaksanaannya hingga generasi V ini, RANHAM dirumuskan secara lebih substatif mencapai hasil yang ditetapkan, termasuk dampak yang dapat terukur. Untuk itu, sistem pemantauan dan evaluasi RANHAM V akan dirumuskan secara lebih komprehensif yang mencakup baseline, target capaian per caturwulan dan target tahunan, serta indikator untuk Kriteria Keberhasilan dan Sasaran Strategis. Dalam mencapai RANHAM yang lebih substantif, panitia RANHAM mempersiapkan pedoman ini secara lebih komprehensif dan sekaligus memperbarui pedoman setiap tahunnya. Pedoman ini diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih rinci kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan Aksi HAM dan sekaligus dalam pelaporan aksi tersebut.

Alasan penulis mengambil judul ini adalah ingin mengetahui komitmen pemerintah Jawa Timur terhadap implementasi RANHAM. Dengan mengambil judul ini, dapat menunjukkan komitmen pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap hak asasi manusia. Implementasi RANHAM melalui pendidikan inklusi adalah langkah konkret untuk memastikan bahwa hak-hak peserta didik dengan kebutuhan khusus dihormati dan dilindungi. Selain itu juga ingin mengetahui pentingnya pendidikan inklusi yang memainkan peran penting dalam memastikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus. Dengan menggabungkan RANHAM dan pendidikan inklusi, kita menggarisbawahi pentingnya memastikan bahwa hak-hak peserta didik dengan kebutuhan khusus terpenuhi.

Pada penelitian sebelumnya, yang dilakukan oleh Dhea Erisa dan Dini Widinarsih yang menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan pendidikan inklusif di tingkat SMA di Surabaya oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, teridentifikasi berbagai hambatan yang dibagi menjadi dua kategori utama yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal mencakup minimnya pemahaman pengawas mengenai ruang lingkup tugas dan fungsinya dalam mengawasi sekolah inklusif, keterbatasan jumlah sumber daya manusia pengawas, serta permasalahan terkait

¹ Ari Pratiwi dkk. 2018. *Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi*, Malang: UB Press

² Dhea Erisa and Dini Widinarsih, "Akses Penyandang Disabilitas Terhadap Pekerjaan: Kajian Literatur," *Jurnal Pembangunan Manusia* 3, no. 1 (February 28, 2022): 7, <https://scholarhub.ui.ac.id/jpm/vol3/iss1/22>.

ketersediaan anggaran.³ Sementara itu, kendala eksternal meliputi lemahnya sistem koordinasi antara Dinas Pendidikan Provinsi dengan penyelenggara pendidikan inklusif dan belum optimalnya implementasi sistem sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah mengambil langkah-langkah strategis, termasuk penerapan sistem pengawasan secara periodik, implementasi program supervisi klinis, serta penguatan sistem pengawasan melalui peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan.⁴

Sedangkan dalam penelitian ini, berfokus pada jenjang pendidikan menengah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki karakteristik dan tantangan unik dalam implementasi pendidikan inklusi. Penelitian ini akan memperhitungkan konteks regional dalam implementasi RANHAM melalui pendidikan inklusi khususnya di jenjang pendidikan menengah. Dengan menggabungkan RANHAM dan pendidikan inklusi, kita berharap dapat memperkuat perlindungan hak-hak peserta didik dengan kebutuhan khusus di Provinsi Jawa Timur.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Peneliti akan mengumpulkan data melalui observasi partisipatif, wawancara, dan analisis dokumen terkait implementasi RANHAM di jenjang pendidikan menengah. Pertama, peneliti akan melakukan observasi partisipatif di sekolah-sekolah di Provinsi Jawa Timur yang menerapkan pendidikan inklusi. Pendekatan ini memungkinkan untuk mengeksplorasi dan memahami makna sosial atau kemanusiaan yang terkait dengan implementasi RANHAM dalam pendidikan inklusi. Dengan metode kualitatif, dapat memahami lebih dalam tentang bagaimana kebijakan ini diterapkan, persepsi para pelaku, dan dampaknya pada peserta didik dengan kebutuhan khusus. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu fenomena atau aktivitas yang terjadi di lingkungan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, akan mendeskripsikan secara rinci bagaimana RANHAM diimplementasikan melalui pendidikan inklusi di jenjang pendidikan menengah di Provinsi Jawa Timur. Fokusnya akan mencakup aspek kebijakan, praktik, dan budaya yang terkait dengan pendidikan inklusi.

Subjek penelitian akan melibatkan para pemangku kepentingan terkait pendidikan inklusi di jenjang pendidikan menengah, seperti kepala sekolah, guru, siswa umum, dan siswa berkebutuhan khusus. Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di beberapa sekolah menengah di Provinsi Jawa Timur yang telah menerapkan pendidikan inklusi. Lokasi ini akan dipilih berdasarkan keberagaman karakteristik sekolah dan implementasi RANHAM yang berbeda-beda. Data akan dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Observasi dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana implementasi RANHAM dan pendidikan inklusi dilakukan di sekolah-sekolah tersebut. Peneliti akan mencatat berbagai aspek terkait seperti kebijakan, strategi,

³ Gauthier De Beco, Shivaun Quinlivan, dan Janet E. Lord, ed., *The Right to Inclusive Education in International Human Rights Law*, 1 ed. (Cambridge University Press, 2019), 59, <https://doi.org/10.1017/9781316392881>.

⁴ Ridwan Iawan Nurrahman and Arinto Nugroho, "Kendala Pengawasan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di SMA Kota Surabaya," *NOVUM: JURNAL HUKUM* 9, no. 3 (2022): 7.

dan kegiatan yang dilakukan dalam menerapkan pendidikan inklusi. Selanjutnya, peneliti akan melakukan wawancara dengan stakeholder terkait, seperti kepala sekolah, guru, orang tua, siswa, dan pihak terkait lainnya yang terlibat dalam implementasi RANHAM dan pendidikan inklusi di jenjang pendidikan menengah. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan dan pengalaman mereka terhadap implementasi RANHAM dan pendidikan inklusi, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam prosesnya.

Selain itu, peneliti akan melakukan analisis dokumen terkait implementasi RANHAM dan pendidikan inklusi di Provinsi Jawa Timur. Dokumen yang diambil sebagai objek analisis antara lain kebijakan dan regulasi terkait, laporan evaluasi, dan dokumen-dokumen lain yang menggambarkan upaya dan hasil dari implementasi RANHAM dan pendidikan inklusi di jenjang pendidikan menengah. Dalam analisis data, peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif dan tematis, dengan mencari pola-pola atau tema-tema yang muncul dari data-data tersebut. Hasil analisis akan digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi sejauh mana implementasi RANHAM melalui pendidikan inklusi di jenjang pendidikan menengah di Provinsi Jawa Timur telah berhasil, serta rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan datang. Melalui metode penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi RANHAM melalui pendidikan inklusi di Provinsi Jawa Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Umum RANHAM (Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia)

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) merupakan sebuah dokumen khusus yang menguraikan arah dan fokus dalam memastikan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, peningkatan, dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di seluruh wilayah Negara, baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Daerah. Melalui RANHAM, tindakan-tindakan terkait HAM yang dijalankan oleh Pemerintah menjadi lebih konkret, terutama dalam menangani kelompok atau aspek yang rentan, seperti Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas, dan Komunitas Adat Terpencil (KAT).⁵ Hal ini mencerminkan tanggung jawab Negara terhadap warga negaranya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan adanya RANHAM diharapkan dapat meningkatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia oleh negara terutama pemerintah dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat istiadat, budaya, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan umum tersebut dicapai melalui beberapa sasaran spesifik, antara lain: 1) Peningkatan pemahaman tentang HAM di kalangan aparatur negara dan masyarakat; 2) Pelaksanaan instrumen HAM dalam kebijakan pemerintah; 3) Peningkatan partisipasi Indonesia dalam forum kerja sama untuk penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM; 4) Peningkatan penanganan terhadap pelanggaran HAM; 5) Peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya untuk berpartisipasi dalam bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. RANHAM dan RAN Penyandang Cacat sebelumnya telah menghasilkan

⁵ Pedoman Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Ham Daerah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025, n.d.

perubahan yang meningkatkan pemahaman pemerintah dan masyarakat terhadap masalah. dan penanganan HAM secara keseluruhan, serta masalah penyandang disabilitas berbasis HAM. Namun, perlu diakui bahwa kemajuan HAM hingga saat ini masih jauh dari optimal.⁶ Setelah Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas diratifikasi, tuntutan untuk pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas menjadi lebih kuat. Konvensi ini mengubah perspektif dari kesejahteraan ke arah pemenuhan hak penyandang disabilitas di berbagai bidang.⁷

Dokumen tersebut menjadi panduan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam memastikan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan peningkatan hak asasi manusia.⁸ Dalam dokumen RANHAN kerangka RANHAM, pendidikan inklusif ditekankan sebagai bagian penting yang menitikberatkan pada integrasi nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan inklusivitas ke dalam sistem pendidikan nasional. Tahap pertama RANHAM (2004-2009) menekankan integrasi pendidikan HAM pada sistem sekolah dasar dan lanjutan, sementara tahap kedua (2010-2014) memperluas fokusnya ke bidang pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang HAM.⁹

Pendidikan Inklusi di Jawa Timur

Konsep inklusif, menurut KBBI, mengandung arti 'termasuk' atau 'terhitung', yang mengimplikasikan tidak adanya pengecualian.¹⁰ Dalam konteks pendidikan, konsep ini diartikan sebagai sistem pembelajaran yang mengakomodasi semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus (ABK). Model pendidikan ini mengintegrasikan peserta didik reguler dan ABK dalam satu ruang pembelajaran yang sama, dengan tujuan memberikan layanan pendidikan yang setara dan membangun pemahaman akan keberagaman.¹¹

Implementasi pendidikan inklusif memerlukan kolaborasi tiga pihak utama: tenaga pendidik, institusi pendidikan, dan pihak keluarga. Pihak sekolah dan guru bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan pelayanan yang merata tanpa diskriminasi, serta menanamkan nilai-nilai keberagaman dan toleransi.¹² Para pengajar juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan diri peserta didik. Sementara itu, orang tua berperan menyelaraskan pendidikan di rumah dengan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah. Indonesia telah menunjukkan komitmennya terhadap pendidikan inklusif sejak 1954 melalui UU Pendidikan No. 12. Perkembangan signifikan terjadi pada 1986 dengan

⁶ Al Khanif et al., "Kajian Tentang Model Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia (RADHAM) Kabupaten Bondowoso Tahun 2018" (June 1, 2019): 431, accessed May 18, 2024, <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/102938>.

⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019*, n.d., 8.

⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019*.

⁹ Majda El Muhtaj et al., "Literasi Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi," *Jurnal HAM* 11, no. 3 (December 11, 2020): 369.

¹⁰ "Hasil Pencarian - KBBI VI Daring," diakses 16 Mei 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/inklusif>.

¹¹ Rahmadin Munauwarah dkk., "Pendidikan Inklusi Solusi Utama Untuk Anak Penyandang Disabilitas," *YASIN* 1, no. 1 (30 Oktober 2021): 123, <https://doi.org/10.58578/yasin.v1i1.21>.

¹² Ignacio Calderón-Almendros dan Gerardo Echeita-Sarrionandia, "Inclusive Education as a Human Right," dalam *Oxford Research Encyclopedia of Education*, oleh Ignacio Calderón-Almendros dan Gerardo Echeita-Sarrionandia (Oxford University Press, 2022), 99, <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264093.013.1243>.

penerapan sistem pendidikan terpadu, yang kemudian disempurnakan melalui Permendiknas RI No. 70 Tahun 2009. Sistem ini berlandaskan pada lima prinsip utama: pemerataan dan peningkatan mutu, kebutuhan individual, kebermaknaan, keberlanjutan, dan keterlibatan.

Pendidikan inklusif memiliki beberapa tujuan strategis, meliputi peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan lingkungan pembelajaran yang menghargai keberagaman, penghapusan diskriminasi, peningkatan kepercayaan diri peserta didik, penguatan toleransi, dan pemenuhan amanat UUD 1945 tentang hak pendidikan. Di Jawa Timur, implementasi pendidikan inklusif telah mencapai kemajuan yang signifikan. Data menunjukkan bahwa 15 dari 38 kabupaten/kota telah mengembangkan program pendidikan inklusif di berbagai jenjang pendidikan. Khusus di Surabaya, tercatat 985 siswa berkebutuhan khusus telah terakomodasi dalam sistem pendidikan inklusif, menunjukkan komitmen daerah dalam mewujudkan pendidikan yang setara untuk semua. Jumlah Siswa Inklusif pada tahun 2019, ada 985 siswa berkebutuhan khusus di Surabaya, dengan proporsi inklusif dari kelas 7 sebanyak 349 dan kelas 8 sebanyak 322 peserta didik.¹³ Dari tahun ke tahun, implementasi RANHAM melalui pendidikan inklusif di provinsi Jawa Timur semakin merata.

Dinas Pendidikan Jawa Timur juga mengirim dua belas orang ke Australia untuk belajar tentang cara mengelola inklusi. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur juga bekerja sama dengan sebuah universitas di Australia untuk mengajar guru. Namun, kebijakan pendidikan inklusif masih menjadi tantangan di beberapa sekolah. Kerjasama Internasional: Sebuah sumber mengatakan bahwa Jawa Timur telah mengirim dua belas orang ke Australia untuk belajar tentang cara mengelola inklusi. Mereka juga bekerja sama dengan sebuah universitas di Australia untuk mengajar guru. Pengembangan Pendidikan Khusus: Sebuah sumber mengatakan bahwa pemprov Jawa Timur tengah sedang menyiapkan pusat pendidikan khusus untuk digunakan dalam pembinaan dan pengembangan.¹⁴

Peran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam Implementasi RANHAM Melalui Pendidikan Inklusi di Jawa Timur

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur memiliki peran penting dalam implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) melalui pendidikan inklusi di jenjang pendidikan menengah Provinsi Jawa Timur. Dalam upaya meningkatkan akses dan kesempatan pendidikan bagi anak-anak dengan disabilitas, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan dan program yang terkait dengan RANHAM. Salah satu contoh kegiatan yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur adalah pelatihan guru dan staf pendidikan tentang pendidikan inklusi dan strategi pengajaran yang efektif untuk siswa dengan disabilitas.¹⁵

Dalam pelatihan ini, guru dan staf pendidikan diberikan pengetahuan dan keterampilan tentang bagaimana mengajar siswa dengan disabilitas, serta bagaimana

¹³ "Jatim Miliki 15 Daerah Yang Punya Sekolah Inklusif," *Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur*, accessed May 16, 2024, <https://kominformasi.jatimprov.go.id/berita/27293>.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ "Rakor Pengumpulan Dan Pengolahan Data Informasi Implementasi Ranham," *Kantor Wilayah Jawa Timur Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia*, accessed May 18, 2024, <https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/2680-rakor-pengumpulan-dan-pengolahan-data-informasi-implementasi-ranham>.

memenuhi kebutuhan khusus mereka. Selain itu, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur juga telah mengembangkan kurikulum yang lebih inklusif, yang memungkinkan siswa dengan disabilitas untuk mengikuti pelajaran yang sama dengan siswa lainnya. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur juga telah berkolaborasi dengan berbagai instansi lainnya, seperti Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi siswa dengan disabilitas.¹⁶

Dalam kerjasama ini, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah mengembangkan program-program yang membantu siswa dengan disabilitas untuk mengakses pendidikan, seperti program bantuan biaya pendidikan dan program pendampingan untuk siswa dengan disabilitas. Selain itu, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur juga telah berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dan program yang terkait dengan RANHAM, seperti seminar dan workshop tentang pendidikan inklusi dan hak asasi manusia.¹⁷ Dalam kegiatan-kegiatan ini, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah berbagi pengalaman dan praktik terbaik tentang bagaimana meningkatkan akses dan kesempatan pendidikan bagi anak-anak dengan disabilitas. Dalam rangka meningkatkan implementasi RANHAM melalui pendidikan inklusi di jenjang pendidikan menengah Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur juga telah mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif.¹⁸

Sistem ini memungkinkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk mengawasi dan mengevaluasi keberhasilan program-program pendidikan inklusi yang telah dilaksanakan, serta untuk mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki. Dalam keseluruhan, peran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam implementasi RANHAM melalui pendidikan inklusi di jenjang pendidikan menengah Provinsi Jawa Timur sangat penting. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan dan program yang terkait dengan RANHAM, serta telah mengembangkan strategi-strategi yang efektif untuk meningkatkan akses dan kesempatan pendidikan bagi anak-anak dengan disabilitas.

Implementasi RANHAM melalui Pendidikan Inklusi di Jawa Timur

Implementasi pendidikan inklusif melalui RANHAM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAM dengan menyebarkan pendidikan HAM di tingkat perguruan tinggi dan masyarakat umum. Komponen pendidikan HAM meliputi pengetahuan, nilai-nilai, sikap dan perilaku, serta tindakan, untuk memperkuat program pendidikan HAM di dunia pendidikan.¹⁹ Pada RANHAM 2015-2019, pendidikan inklusif diintegrasikan dengan tujuan yang sama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAM dan memperkuat implementasi program pendidikan

¹⁶ “Siap Dukung Implementasi RANHAM 2021-2025,” accessed May 18, 2024, <https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/10215-siap-dukung-implementasi-ranham-2021-2025>.

¹⁷ Khanif et al., “Kajian Tentang Model Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia (RADHAM) Kabupaten Bondowoso Tahun 2018,” 437.

¹⁸ Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Sekretariat Bersama Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, “Capaian Aksi HAM 2015-2017 Dan Rencana Aksi HAM Daerah 2018-2019 Sebagai Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015),” n.d., 20.

¹⁹ El Muhtaj et al., “Literasi Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi,” 376–377.

HAM. Rencana aksi ini merinci sasaran, strategi, dan prioritas kegiatan dalam RANHAM, serta menjadi acuan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menjalankan tanggung jawab mereka terkait HAM di Indonesia.²⁰

Penerapan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dalam sektor pendidikan Provinsi Jawa Timur menitikberatkan pada integrasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) ke dalam struktur pendidikan nasional. RANHAM di Provinsi Jawa Timur mengambil pijakan pada prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan inklusivitas untuk kelompok yang rentan. Langkah-langkah implementasinya meliputi, Pendidikan HAM di jenjang sekolah menengah. Prioritas RANHAM di Provinsi Jawa Timur adalah memberikan pendidikan HAM untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAM dan memperkuat program pendidikan HAM. Pendidikan ini mencakup tiga aspek kunci yaitu pengetahuan dan keterampilan, nilai-nilai, sikap dan perilaku, serta tindakan, untuk memperkuat program pendidikan HAM.²¹

Sasaran utama penerapan Pendidikan inklusif di provinsi Jawa Timur adalah siswa penyandang disabilitas. Menurut Peraturan Pemerintah RI nomor 13 tahun 2020 Pasal 1 yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.²² Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yaitu dengan melakukan aksi HAM 4. Tujuan dari Aksi HAM 4 adalah mendorong upaya - upaya pencapaian target kuota dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, badan usaha milik negara/daerah dan swasta.²³

Kriteria keberhasilan Aksi HAM 4 ini adalah peningkatan jumlah perusahaan yang menyediakan sistem dukungan kerja (akomodasi yang layak) bagi penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, badan usaha milik negara, daerah, dan swasta sesuai dengan ragam disabilitas. Selain itu, data tentang jumlah penyandang disabilitas yang bekerja di sektor swasta tersedia. Sedangkan ukuran keberhasilan dari aksi HAM 4 adalah *pertama*, terlaksananya pertemuan atau rapat untuk membahas draf kebijakan yang mendorong pencapaian target kuota dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas di sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan swasta. Kedua, tersedianya draf kebijakan yang mendorong pencapaian target kuota dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas di sektor BUMD dan swasta.²⁴

Implementasi *kedua* dengan penguatan HAM bagi Guru. RANHAM di Provinsi Jawa Timur juga melibatkan upaya penguatan HAM bagi guru dengan tujuan meningkatkan pemahaman mereka tentang HAM dan mengintegrasikan nilai-nilai HAM

²⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019*, 8–12.

²¹ “Menjadi Guru Bernuansa HAM – Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia,” accessed May 11, 2024, <https://portal.ham.go.id/2015/09/5292/>.

²² *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Pet (Yandang Disabilitas*, n.d., 2.

²³ Direktorat Jendral HAM, “Format Pelaporan Aksi Ham Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2024,” n.d., 25.

²⁴ *Ibid.*, 26.

dalam lingkungan pendidikan.²⁵ Guru dianggap sebagai agen penting dalam mentransfer nilai-nilai HAM kepada siswa dan menjadi contoh bagi mereka. *Ketiga*, penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL). Setelah mengikuti pelatihan penguatan HAM, guru diminta untuk menyusun RTL sebagai hasil konkret dari pelatihan tersebut. RTL ini diharapkan dapat diterapkan dan disosialisasikan kepada rekan-rekan pendidik dan staf kependidikan lainnya di lingkungan mereka, sehingga pemahaman tentang HAM dapat berlanjut setelah pelatihan selesai.²⁶

Secara ringkas, penerapan RANHAM di sektor pendidikan Provinsi Jawa Timur bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai HAM ke dalam sistem pendidikan nasional. Langkah-langkahnya mencakup pendidikan HAM, penguatan HAM bagi guru, dan penyusunan Rencana Tindak Lanjut. RANHAM tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan inklusivitas kelompok rentan, serta menjadi pedoman bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menjalankan tanggung jawab mereka terkait HAM di Indonesia.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengimplementasikan pendidikan inklusi di sekolah menengah. Berbagai upaya telah dilakukan, antara lain Pengembangan regulasi: Pemerintah daerah telah mengeluarkan peraturan dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan pendidikan inklusi, seperti Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan dan workshop diberikan kepada guru-guru untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam mengajar siswa berkebutuhan khusus.²⁷ Penyediaan sarana dan prasarana: Sekolah-sekolah inklusi dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi siswa berkebutuhan khusus, seperti ramp, toilet khusus, dan alat bantu belajar. Kerjasama dengan berbagai pihak: Pemerintah daerah bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga terkait, seperti universitas dan pusat layanan disabilitas, untuk mendukung implementasi pendidikan inklusi.

Untuk mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan implementasi RANHAM melalui pendidikan inklusi di Jawa Timur, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan: Meningkatkan sosialisasi dan edukasi: Sosialisasi dan edukasi tentang pendidikan inklusi perlu dilakukan secara intensif kepada masyarakat, orang tua, dan guru. Memperkuat kebijakan dan regulasi: Pemerintah perlu memperkuat kebijakan dan regulasi yang mendukung implementasi pendidikan inklusi, termasuk alokasi anggaran yang memadai. Meningkatkan kapasitas guru: Pelatihan dan pengembangan profesionalisme guru perlu terus ditingkatkan agar mereka memiliki kompetensi yang memadai dalam mengajar siswa berkebutuhan khusus.²⁸ Membangun kerjasama yang kuat: Kerjasama antara

²⁵ Munauwarah et al., "Pendidikan Inklusi Solusi Utama Untuk Anak Penyandang Disabilitas," 130.

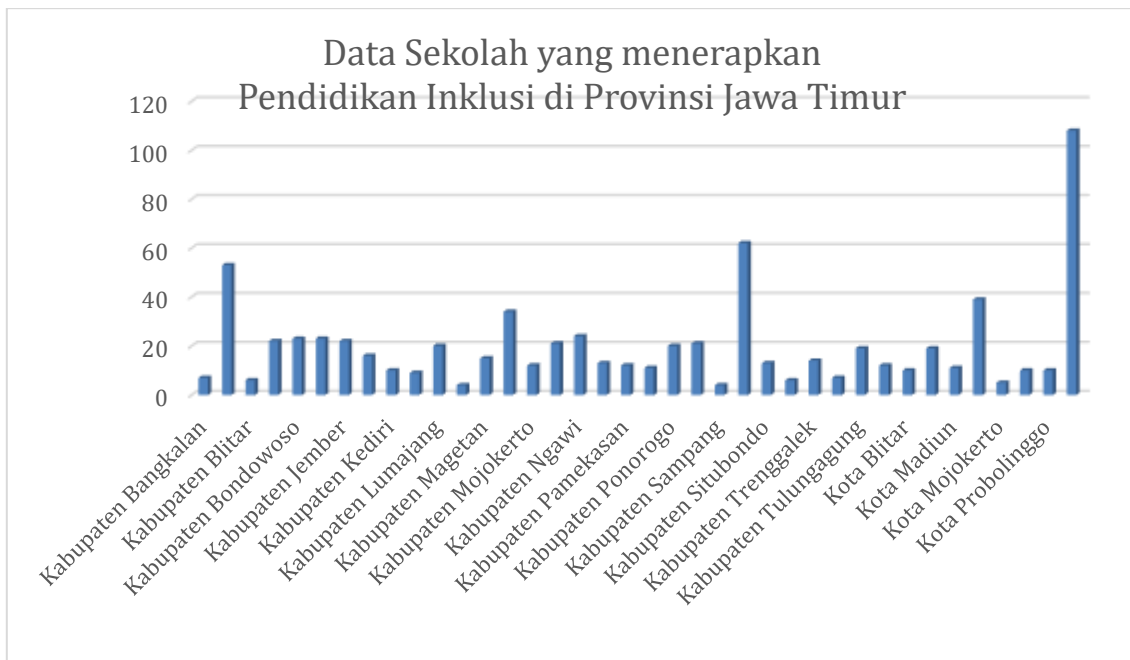
²⁶ Zola Permata Sari, Riska Sarofah, dan Yusuf Fadli, "The Implementation of Inclusive Education in Indonesia: Challenges and Achievements," *Jurnal Public Policy* 8, no. 4 (30 Oktober 2022): 260, <https://doi.org/10.35308/jpp.v8i4.5420>.

²⁷ Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Sekretariat Bersama Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, "Capaian Aksi Ham 2015-2017 Dan Rencana Aksi HAM Daerah 2018-2019 Sebagai Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015)," 16.

²⁸ Ifitita Rahmi dkk., "Strategies for Successful Implementation of Inclusive Education in Indonesia: A Review," *In Trend: International Journal of Trends in Global Psychological Science and Education* 1, no. 3 (13 Juni 2024): 30–36, <https://doi.org/10.62260/intrend.v1i3.170>.

pemerintah, sekolah, orang tua, dan organisasi masyarakat sipil perlu diperkuat untuk mendukung keberhasilan pendidikan inklusi. Pengembangan kurikulum inklusif, Kurikulum yang ada perlu direvisi agar lebih inklusif dan mengakomodasi kebutuhan semua siswa.²⁹

Implementasi pendidikan inklusi di sekolah menengah di Jawa Timur telah menunjukkan beberapa hasil positif, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan. Hasil positif dari adanya pendidikan inklusi yaitu meningkatnya aksesibilitas Pendidikan.³⁰ Semakin banyak siswa berkebutuhan khusus yang dapat mengakses pendidikan di sekolah reguler. Hal ini memberikan kesempatan yang sama bagi mereka untuk belajar dan mengembangkan potensi diri. Sebagaimana data yang di peroleh dari Dinas Pendidikan Jawa Timur mengenai sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi yang disimpulkan pada gambar grafik berikut.



Gambar 1. Data Sekolah yang menerapkan Pendidikan Inklusi di Provinsi Jawa Timur

Dari data yang disajikan, dapat dijelaskan pertama, sebaran sekolah inklusif. Data menunjukkan perbedaan jumlah sekolah inklusif antar wilayah. Hal ini mungkin menunjukkan adanya perbedaan dalam kebijakan pendidikan setempat, sumber daya yang tersedia, dan persepsi masyarakat mengenai pentingnya pendidikan inklusif. Kedua, keterjangkauan pendidikan inklusif.³¹ Daerah dengan sekolah yang lebih inklusif mungkin memberikan akses yang lebih baik bagi siswa berkebutuhan khusus. Hal ini

²⁹ Ibid., 25.

³⁰ Rebecca Swanson Gehrke dan Martha Cocchiarella, "Preservice Special and General Educators' Knowledge of Inclusion," *Teacher Education and Special Education: The Journal of the Teacher Education Division of the Council for Exceptional Children* 36, no. 3 (Agustus 2013): 51, <https://doi.org/10.1177/0888406413495421>.

³¹ Calderón-Almendros dan Echeita-Sarrionandia, "Inclusive Education as a Human Right," 37.

penting untuk memastikan bahwa setiap anak mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Ketiga, kebutuhan pembangunan. Daerah dengan jumlah sekolah inklusif yang lebih sedikit mungkin memerlukan lebih banyak perhatian dan investasi untuk mengembangkan infrastruktur pendidikan inklusif, program pelatihan guru, dan dukungan siswa.³² Keempat, evaluasi kebijakan. Data ini dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk mengevaluasi efektivitas program pendidikan inklusif saat ini dan merencanakan strategi perbaikan di masa depan.

Secara keseluruhan, analisis data ini dapat membantu memahami kondisi pendidikan inklusif saat ini di Jawa Timur dan mengembangkan langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pendidikan bagi semua anak.³³ Penting untuk terus memantau dan mengevaluasi data ini secara berkala untuk memastikan bahwa pendidikan inklusif terus berkembang dan memenuhi kebutuhan semua siswa. Menurut informasi yang ada, pendidikan inklusif di Jawa Timur telah mengalami perkembangan yang signifikan. Publikasi “Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2023” menyajikan beberapa indikator penting di bidang pendidikan, termasuk pendidikan inklusif.

Angka partisipasi sekolah di Provinsi Jawa Timur yang semakin meningkat menunjukkan semakin banyak anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan akses terhadap pendidikan formal. Tingkat pendidikan tertinggi yang diselesaikan oleh siswa inklusif juga semakin meningkat, hal ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusif tidak hanya memberikan akses, namun juga memungkinkan siswa untuk menyelesaikan pendidikannya pada jenjang yang lebih tinggi. Rata-rata lama bersekolah siswa inklusif juga mengalami peningkatan, yang menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus mempunyai kemungkinan lebih besar untuk bersekolah lebih lama dan menerima pendidikan yang lebih inklusif.

Angka melek huruf di kalangan siswa inklusif juga meningkat, yang merupakan indikator penting mengenai keterampilan dasar yang diperoleh melalui pendidikan inklusif. Selain itu, pendidikan anak usia dini (PAUD) yang inklusif, dengan program yang dirancang untuk membantu anak-anak berkebutuhan khusus memulai pendidikan mereka dengan dukungan yang tepat, telah menjadi fokus utama. Dari sudut pandang kebijakan, pemerintah telah mengambil langkah-langkah penting untuk mendukung pendidikan inklusif, termasuk alokasi anggaran khusus dan pengembangan kurikulum yang sesuai. Hal ini tercermin dari temuan yang menunjukkan bahwa belanja pemerintah untuk pendidikan mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Jawa Timur⁷.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa pendidikan inklusif di Jawa Timur berkembang ke arah positif dengan meningkatnya akses, kualitas, dan dukungan politik.³⁴ Namun demikian, tantangan masih tetap ada, seperti peningkatan fasilitas dan sumber daya serta pelatihan guru untuk pendidikan inklusif yang lebih efektif.³⁵ Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk keluarga, masyarakat dan lembaga pendidikan,

³² Agung Rustandar and Dini Widinarsih, “Metode Dan Media Pembelajaran Untuk Pendidikan Inklusi Bagi Penyandang Autis Di Indonesia,” last modified April 2023, accessed May 2, 2024, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3447694>.

³³ Satrianawati, *Pendidikan inklusi*, 1 (Yogyakarta: Yogyakarta: Deepublish, 2019).

³⁴ Zeni Hafidhotun Nisak, “Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusif Di Indonesia,” *Primary Education Journal (PEJ)* 2, no. 1 (9 Juli 2018): 101, <https://doi.org/10.30631/pej.v2i1.18>.

³⁵ Muazar Habibi, *Bahan Ajar Parenting ABK dan Inklusi* (Yogyakarta: Deepublish, 2022), 54.

merupakan kunci bagi kelanjutan pengembangan pendidikan inklusif yang bermanfaat bagi seluruh siswa.

Peningkatan kualitas pembelajaran, guru-guru di sekolah inklusi semakin terlatih dan memiliki kompetensi yang lebih baik dalam mengajar siswa berkebutuhan khusus.³⁶ Hal ini berdampak positif pada kualitas pembelajaran bagi semua siswa. Perubahan sikap dan perilaku masyarakat, implementasi pendidikan inklusi telah berkontribusi pada perubahan sikap dan perilaku masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Stigma dan diskriminasi terhadap siswa berkebutuhan khusus mulai berkurang. Peningkatan partisipasi dan prestasi belajar, siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi menunjukkan peningkatan partisipasi dan prestasi belajar.³⁷ Mereka merasa lebih diterima dan dihargai di lingkungan sekolah. Dan mendapatkan pembelajaran yang layak serta didukung dengan infrastruktur yang ada.

KESIMPULAN

Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) melalui pendidikan inklusi di Jawa Timur telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan mempromosikan keadilan serta inklusivitas, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Pendekatan ini mencakup berbagai upaya seperti pendidikan HAM di tingkat sekolah menengah, yaitu 1) meningkatkan sosialisasi dan edukasi dan penguatan kapasitas guru, 2) memperkuat kebijakan dan regulasi penyediaan infrastruktur yang ramah disabilitas, serta pengembangan kebijakan dan regulasi pendukung.

Hasil dari implementasi pendidikan inklusi ini mencakup: 1) Meningkatnya aksesibilitas pendidikan terbukti dengan lebih banyak siswa berkebutuhan khusus yang mendapatkan akses ke pendidikan formal di sekolah reguler. 2) Peningkatan kualitas pembelajaran, yaitu guru-guru di sekolah inklusi semakin terlatih, sehingga mampu memberikan pembelajaran yang lebih efektif. 3) Adanya perubahan sikap masyarakat yang memahami bahwa pendidikan inklusi telah berkontribusi pada pengurangan stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. 4) Peningkatan partisipasi dan prestasi belajar dari siswa berkebutuhan khusus. 5) Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan alokasi anggaran untuk mendukung keberlanjutan pendidikan inklusi.

Meski demikian, perluasan jumlah sekolah inklusi dengan infrastruktur dan sumber daya yang baik tetap perlu dilanjutkan. Oleh karena itu dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan pengembangan pendidikan inklusi yang lebih berkualitas di Jawa Timur. Dengan terus memantau dan mengevaluasi kebijakan serta program yang ada, diharapkan pendidikan inklusi dapat memenuhi kebutuhan seluruh siswa dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan sosial dan ekonomi.

³⁶ Aldjon Nixon Dapa dan Roos Marie Stella Tuerah, *Manajemen Sekolah Inklusi* (Yogyakarta, 2021).

³⁷ Sarah N. Douglas, Shelley E. Chapin, dan James F. Nolan, "Special Education Teachers' Experiences Supporting and Supervising Paraeducators: Implications for Special and General Education Settings," *Teacher Education and Special Education: The Journal of the Teacher Education Division of the Council for Exceptional Children* 39, no. 1 (Februari 2016): 69, <https://doi.org/10.1177/0888406415616443>.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Rustandar and Dini Widinarsih. "Metode Dan Media Pembelajaran Untuk Pendidikan Inklusi Bagi Penyandang Autis Di Indonesia." Last modified April 2023. Accessed May 2, 2024. <https://garuda.kemdikbud.go.id/Documents/Detail/3447694>.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019*, N.D.
- Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Sekretariat Bersama Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. "Capaian Aksi Ham 2015-2017 Dan Rencana Aksi Ham Daerah 2018-2019 Sebagai Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015)," N.D.
- Direktorat Jendral Ham. "Format Pelaporan Aksi Ham Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2024," n.d.
- El Muhtaj, Majda, M. Fahmi Siregar, Reh Bungana Beru Pa, and Fazli Rachman. "Literasi Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi." *Jurnal HAM* 11, no. 3 (December 11, 2020): 369.
- Erissa, Dhea, and Dini Widinarsih. "Akses Penyandang Disabilitas Terhadap Pekerjaan: Kajian Literatur." *Jurnal Pembangunan Manusia* 3, no. 1 (February 28, 2022). <https://scholarhub.ui.ac.id/jpm/vol3/iss1/22>.
- Khanif, Al, Adam Muhshi, Rosita Indrayati, Nurul Laili Fadhilah, Dina Tsalist Wildana, Ayu Citra Satyaningtyas, and Muhammad Bahrul. "Kajian Tentang Model Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia (RADHAM) Kabupaten Bondowoso Tahun 2018" (June 1, 2019). Accessed May 18, 2024. <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/102938>.
- Munauwarah, Rahmadin, Ashadatul Zahra, Muhamad Supandi, Risma Ardianti Restiany, and Dimas Afrizal. "Pendidikan Inklusi Solusi Utama Untuk Anak Penyandang Disabilitas." *YASIN* 1, no. 1 (October 30, 2021): 121–133.
- Nurrahman, Ridwan Iawan, and Arinto Nugroho. "Kendala Pengawasan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di SMA Kota Surabaya." *NOVUM: JURNAL HUKUM* 9, no. 3 (2022): 31–40.
- "Hasil Pencarian-KBBI VI Daring." Accessed May 16, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/inklusif>.
- "Jatim Miliki 15 Daerah Yang Punya Sekolah Inklusif." *Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur*. Accessed May 16, 2024. <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/27293>.

“Menjadi Guru Bernuansa HAM – Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia.” Accessed May 11, 2024. <https://portal.ham.go.id/2015/09/5292/>.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Pet (Yandang Disabilitas, N.D.

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025, n.d.

“Rakor Pengumpulan Dan Pengolahan Data Informasi Implementasi RANHAM.” *Kantor Wilayah Jawa Timur / Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.* Accessed May 18, 2024. <https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/2680-rakor-pengumpulan-dan-pengolahan-data-informasi-implementasi-ranham>.

“Siap Dukung Implementasi RANHAM 2021-2025.” Accessed May 18, 2024. <https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/10215-siap-dukung-implementasi-ranham-2021-2025>.

Aldjon Nixon Dapa dan Roos Marie Stella Tuerah. *Manajemen Sekolah Inklusi.* Yogyakarta, 2021.

Brown, Zeta, ed. *Inclusive education: perspectives on pedagogy, policy and practice.* First published 2016. Routledge Education Studies Series. London; New York: Routledge, 2016.

Calderón-Almendros, Ignacio, dan Gerardo Echeita-Sarrionandia. “Inclusive Education as a Human Right.” Dalam *Oxford Research Encyclopedia of Education*, oleh Ignacio Calderón-Almendros dan Gerardo Echeita-Sarrionandia. Oxford University Press, 2022. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264093.013.1243>.

De Beco, Gauthier, Shivaun Quinlivan, dan Janet E. Lord, ed. *The Right to Inclusive Education in International Human Rights Law.* 1 ed. Cambridge University Press, 2019. <https://doi.org/10.1017/9781316392881>.

Douglas, Sarah N., Shelley E. Chapin, dan James F. Nolan. “Special Education Teachers’ Experiences Supporting and Supervising Paraeducators: Implications for Special and General Education Settings.” *Teacher Education and Special Education: The Journal of the Teacher Education Division of the Council for Exceptional Children* 39, no. 1 (Februari 2016): 60–74. <https://doi.org/10.1177/0888406415616443>.

Gehrke, Rebecca Swanson, dan Martha Cocchiarella. “Preservice Special and General Educators’ Knowledge of Inclusion.” *Teacher Education and Special Education: The Journal of the Teacher Education Division of the Council for Exceptional*

- Children 36, no. 3 (Agustus 2013): 204–16.
<https://doi.org/10.1177/0888406413495421>.
- “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring.” Diakses 16 Mei 2024.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/inklusif>.
- Muazar Habibi. Bahan Ajar Parenting ABK dan Inklusi. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Munauwarah, Rahmadin, Ashadatul Zahra, Muhamad Supandi, Risma Ardianti Restiany, dan Dimas Afrizal. “Pendidikan Inklusi Solusi Utama Untuk Anak Penyandang Disabilitas.” YASIN 1, no. 1 (30 Oktober 2021): 121–33.
<https://doi.org/10.58578/yasin.v1i1.21>.
- Nisak, Zeni Hafidhotun. “Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusif Di Indonesia.” PRIMARY EDUCATION JOURNAL (PEJ) 2, no. 1 (9 Juli 2018): 98–107.
<https://doi.org/10.30631/pej.v2i1.18>.
- Rahmi, Iftita, Hanny Rufaidah Damra, Erika Desvianti, dan Hanifa Laura Dalimunthe. “Strategies for Successful Implementation of Inclusive Education in Indonesia: A Review.” In Trend : International Journal of Trends in Global Psychological Science and Education 1, no. 3 (13 Juni 2024): 30–36.
<https://doi.org/10.62260/intrend.v1i3.170>.
- Sari, Zola Permata, Riska Sarofah, dan Yusuf Fadli. “The Implementation of Inclusive Education in Indonesia: Challenges and Achievements.” Jurnal Public Policy 8, no. 4 (30 Oktober 2022): 264. <https://doi.org/10.35308/jpp.v8i4.5420>.
- Satrianawati. Pendidikan inklusi. 1. Yogyakarta: Yogyakarta : Deepublish, 2019.
- Soleh, Badrus., Ulum Munawwaroh. “Multiple Intelligence Learning-Based Education Management For Students With Special Needs. *JIEMAN: Journal of Islamic Educational Management* 5, no. 1 (29 Juni 2023): 1-17.
<https://jieman.uinkhas.ac.id/index.php/jieman/article/view/182>.